

Representasi Politik di Kalangan Pemilih Muda: Analisis Preferensi Politik Mahasiswa pada Pilkada Jawa Barat 2024

Diani Dewi Saila ^{a, 1*}, Karim Suryadi ^{a, 2}, Vini Agustiani Hadian ^{a, 3}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ dianidsl@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 Maret 2025;

Revised: 8 April 2025;

Accepted: 24 April 2025.

Kata kata kunci:

Representasi Politik;

Preferensi Politik;

Warga Negara Muda;

Pilkada;

Jawa Barat.

: ABSTRAK

Partisipasi politik warga negara muda dalam pemilihan kepala daerah menjadi sorotan penting dalam dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Warga negara muda memiliki potensi besar dalam menentukan arah kebijakan publik, namun partisipasi dan preferensi politik mereka kerap dianggap fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis preferensi politik warga negara muda dalam Pilkada Jawa Barat tahun 2024, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pemilih muda, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki pola pemilihan yang menekankan kepada rekam jejak, pengalaman, visi misi calon, program kerja, partai pengusung, latar belakang pendidikan kandidat serta isu-isu yang berkaitan langsung dengan pendidikan, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi politik warga negara muda semakin berkembang menuju ke arah yang lebih baik dan berdaya kritis. Temuan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran politik yang dipengaruhi oleh akses terhadap informasi digital.

ABSTRACT

Political Representation Among Young Voters: An Analysis of University Students' Political Preferences in the 2024 West Java Regional Election. The political participation of young citizens in regional elections has become a significant focal point in the dynamics of local democracy in Indonesia. Young citizens hold substantial potential in shaping public policy direction; however, their political participation and preferences are often perceived as fluctuating and influenced by various social, economic, and technological factors. This study aims to describe and analyze the political preferences of young citizens in the 2024 West Java Regional Election, as well as the factors influencing them. A qualitative approach with a case study method was employed, with data collected through in-depth interviews with young voters, observations, and documentation. The findings reveal that students at the Indonesia University of Education (UPI) exhibit voting patterns that prioritize candidates' track records, experience, visions and missions, work programs, supporting political parties, educational backgrounds, and issues directly related to education, employment, and public welfare. These results suggest that the political preferences of young citizens are evolving toward a more critical and constructive orientation. The study also indicates a growing political awareness among youth, driven by increased access to digital information.

Keywords:

Political

Representation;

Political Reference;

Young Citizens;

Religious Election;

West Java.

Copyright © 2025 (Diani Dewi Saila, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Saila, D. D., Suryadi, K., & Hadian, V. A. (2025). Representasi Politik di Kalangan Pemilih Muda: Analisis Preferensi Politik Mahasiswa pada Pilkada Jawa Barat 2024. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(4), 165–172.
<https://doi.org/10.56393/decive.v5i4.2950>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokratis yang dilakukan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, beserta wakilnya (Suyatno, 2016). Pilkada merupakan bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin di tingkat daerah yang akan menjalankan pemerintahan selama periode tertentu, biasanya lima tahun (Febriantanto, 2019). Di Indonesia sendiri, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis. “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*” Prinsip-prinsip demokratis itu ialah kedaulatan rakyat, transparansi dan akuntabilitas. Melalui Pilkada yang dilaksanakan secara langsung, dengan itu rakyat dapat menilai calon kandidat dengan mengacu pada visi, misi dan rekam jejak (*track record*) masing-masing kandidat (Sinka & Mukhsan, 2024). Maka, dengan adanya Pilkada masyarakat tidak hanya berpartisipasi aktif dalam mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki peluang untuk memilih calon pemimpin yang dianggap paling mampu mewakili keinginan, aspirasi, dan cita-cita yang kemudian akan berpengaruh dalam setiap aspek di kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam dinamika politik Indonesia, warga negara muda (*young citizens*) memiliki peran strategis yang sangat penting, terutama karena jumlah mereka yang signifikan menjadikan mereka sebagai kelompok demografis terbesar di negara ini. Selain itu, warga negara berhak untuk terlibat dalam pemerintahan dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik. (Putri et al., 2023). Sementara itu, mereka yang bukan warga negara adalah orang-orang yang berada di suatu negara namun tidak menjadi anggota negara tersebut secara hukum, meskipun mereka tetap tunduk pada pemerintahan di tempat mereka berada. (Hutabarat dkk., 2022)

Dalam ranah sosial dan politik, warga negara muda dipandang sebagai generasi potensial yang dapat berkontribusi signifikan terhadap kemajuan negara melalui energi, ide-ide segar, dan inovasi mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Warga negara muda Indonesia yang berjiwa pancasila perlu memiliki wawasan global, karena prinsip kemanusiaan dalam sila kedua pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat mendorong mereka untuk berpikir secara global (Murdiono et al., 2015).

Dalam konteks PKn, konsep Locke ini menggarisbawahi bahwa preferensi politik warga negara muda tidak hanya dibentuk oleh pilihan pribadi, tetapi juga oleh kewajiban sosial untuk melindungi hak-hak mereka dalam masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan harus memperkenalkan konsep hak dan kewajiban politik, serta pentingnya partisipasi dalam sistem demokrasi untuk memastikan tercapainya tujuan bersama, seperti keadilan dan kesejahteraan. (Efendi & Poernomo, 2022). Kehadiran generasi muda dalam konteks ini warga negara muda bukan hanya memperkuat basis pemilih, tetapi juga dapat membawa angin segar dalam proses pemilihan kepala daerah. Warga negara muda juga merupakan kelompok pemilih yang sangat penting dalam Pilkada ini karena mereka memiliki potensi untuk menjadi pemilih yang kritis dan rasional (Fithriya, 2014). Secara umum, warga negara merupakan individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara, dengan hak dan kewajiban yang dijamin oleh konstitusi serta peraturan hukum negara tersebut. Hak-hak ini mencakup hak-hak sipil, politik, dan sosial, seperti hak untuk memilih, kebebasan berpendapat, serta hak atas perlindungan hukum. Dilihat dari perspektif politik, warga negara muda merupakan penerus generasi sebelumnya. Mengutip dari Sumantri kelompok usia 17 hingga 35 tahun telah diakui memiliki hak-hak politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terlihat dari partisipasi mereka dalam Pemilihan Umum (pemilu) sejak usia 17 tahun (Sumantri et al., 2008). Peran warga negara muda (generasi milenial dan generasi z) dinilai sangat penting dan juga berpengaruh karena beberapa alasan seperti jumlah yang

besar dari populasi penduduk Indonesia, mereka adalah para penentu nasib masa depan bangsa dan generasi yang paling dekat dengan teknologi dan informasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, generasi muda merupakan kelompok usia yang mendominasi struktur populasi penduduk Indonesia. Dari total penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 282,4 juta jiwa kelompok usia muda diantaranya generasi z di Indonesia berjumlah sekitar 75,49 juta jiwa, atau sekitar 27,94 persen dari total populasi penduduk. Sementara itu, kelompok penduduk terbesar kedua adalah generasi milenial, dengan jumlah sekitar 69,38 juta jiwa atau 25,87 persen dari populasi. Generasi Z meliputi individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, yang kini berusia antara 8 hingga 23 tahun, sedangkan generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996, dengan rentang usia 24 hingga 39 tahun. (BPS, 2023).

Mengacu pada data yang telah disurvei oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) generasi muda, dalam hal ini generasi z dan milenial akan memegang kendali dan memiliki peranan penting dalam menentukan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU, total pemilih tetap untuk gen z (lahir 1997-2012) mencapai 46,8 juta dan milenial sebanyak 66,8 juta (rentang usia 1981-1996) lebih unggul daripada gen z. Dengan total generasi z dan generasi milenial, suara yang disumbangkan oleh mereka bisa menjadi tolok ukur dalam menentukan masa depan bangsa. (KPU, 2024). Pilkada Jawa Barat 2024 menjadi sorotan bagi kalangan masyarakat setempat, dimana ini merupakan ajang penting dalam dinamika politik lokal, berbagai kandidat berkompetisi untuk mendapatkan perhatian publik dan memimpin provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia ini. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dengan populasi mencapai 50,35 juta jiwa pada Juni 2024.

Provinsi ini memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,13% dan berkontribusi sekitar 18% dari total populasi nasional. Jawa Barat juga mencatatkan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yakni 1.359 jiwa per kilometer persegi. (BPS, 2024).

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024

Generasi	Total (dalam juta)
Generasi Z (1997-2012)	46.800.161
Milenial (1981-1996)	66.822.389
Generasi X (1965-1980)	57.466.482
Baby Boomer (1946-1964)	28.127.340
Pre-Boomer (<1945)	3.570.850

Meskipun memiliki potensi yang cukup signifikan, pada kenyataannya preferensi politik warga negara muda menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap partisipasi dan kualitas pilihan politik mereka. Salah satu masalah utama adalah apatisisme politik, di mana sebagian besar generasi muda merasa bahwa politik tidak memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik, yang sering kali dianggap korup dan tidak transparan, semakin memperkuat sikap apatis ini. Minat generasi Z terhadap politik tergolong sangat rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis studi kasus pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan melihat preferensi politik mereka terhadap calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2024. Dengan mempelajari preferensi politik mereka maka peneliti dapat melihat bagaimana mereka dapat menentukan arah politik bangsa Indonesia untuk 5 tahun kedepan. Selain itu, dengan mengkaji preferensi politik mahasiswa pada calon pemimpin baru dapat menjadikan pengalaman yang berharga mengenai dinamika politik dan mencatat sejarah baru untuk dunia politik di Indonesia. Dengan fokus masalah a) Bagaimana Kriteria Ideal yang Mendasari Mahasiswa UPI dalam Menentukan Pilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat b)

Bagaimana Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Politik Mahasiswa UPI dalam Memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Metode

Penelitian ini berfokus pada analisis kriteria ideal yang mendasari mahasiswa dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan pilihannya. Data yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap mahasiswa UPI, Ketua Organisasi Intra dan Ketua Organisasi Ekstra yang dilakukan secara alami, holistik, menekankan pada kualitas, menggunakan berbagai pendekatan, dan hasilnya disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah sedangkan metode penelitian studi kasus ialah pendekatan penelitian yang memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai aspek dari individu, kelompok, atau organisasi tertentu (Sugiyono, 2020.). Dalam penelitian ini, peneliti diharuskan mengumpulkan dan mengolah sebanyak mungkin data yang berkaitan dengan subjek yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam dimensi politik, warga negara berperan serta dan berbagi peran dalam pemerintahan. Mereka adalah individu yang pada satu waktu berada di bawah kepemimpinan dan di waktu lain dapat menjadi pemimpin, dengan fungsi serta peran masing-masing yang saling melengkapi. (Winorna, 2019). Pada dasarnya konsep warga negara atau *citizens* menurut Aristoteles selalu berdimensi politik.

Menurut Aristoteles, warga negara merupakan individu yang menjadi bagian dari masyarakat politik serta memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negara. Ia juga berpendapat bahwa warga negara berhak untuk terlibat dalam pemerintahan dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik. (Putri dkk., 2023).

Mengacu pada data yang telah disurvei oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) generasi muda, dalam hal ini generasi z dan milenial akan memegang kendali dan memiliki peranan penting dalam menentukan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU, total pemilih tetap untuk gen z (lahir 1997-2012) mencapai 46,8 juta dan milenial sebanyak 66,8 juta (rentang usia 1981-1996) lebih unggul daripada gen z. Dengan total generasi z dan generasi milenial, suara yang disumbangkan oleh mereka bisa menjadi tolok ukur dalam menentukan masa depan bangsa. (KPU, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang cukup signifikan, pada kenyataannya preferensi politik warga negara muda menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap partisipasi dan kualitas pilihan politik mereka. Salah satu masalah utama adalah apatisisme politik, di mana sebagian besar generasi muda merasa bahwa politik tidak memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik, yang sering kali dianggap korup dan tidak transparan, semakin memperkuat sikap apatis ini. Minat generasi Z terhadap politik tergolong sangat rendah.

Ada berbagai alasan yang mendasarinya, seperti anggapan bahwa politik adalah urusan orang dewasa, tidak memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka, dianggap penuh dengan praktik korupsi, atau sekadar ajang perebutan kekuasaan. Bagi kaum muda, politik seringkali dipandang terlalu formal, sehingga banyak dari mereka memilih untuk menghindari pembicaraan tentang topik tersebut. (Fatma Sjoraida & Ruchiat Nugraha, 2023). Tingkat literasi politik yang rendah juga menjadi kendala signifikan dalam menentukan preferensi politik generasi muda. Banyak pemuda tidak memahami pentingnya peran politik dalam kehidupan mereka, sehingga sulit menilai calon kepala daerah secara objektif. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh propaganda, janji-janji populis, atau politik identitas. Alih-alih memilih berdasarkan program kerja yang konkret, sebagian besar generasi muda masih cenderung terjebak pada pilihan yang didasarkan pada faktor emosional, seperti kesamaan agama, suku, atau figur publik yang populer.

Selain itu, minimnya representasi generasi muda dalam politik juga menjadi faktor yang memengaruhi preferensi mereka. Generasi muda sering kali merasa bahwa isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan keberlanjutan lingkungan, tidak cukup diperhatikan oleh calon kepala daerah. Kurangnya figur pemimpin muda yang dapat menjadi panutan memperkuat rasa keterasingan mereka dari proses politik. Hal ini menyebabkan banyaknya dari mereka memilih berdasarkan popularitas kandidat tanpa memperhatikan kompetensi atau visi-misi yang ditawarkan. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa preferensi politik warga negara muda tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan sosial.

Mahasiswa UPI sebagai bagian dari pemilih muda yang kritis memiliki kriteria tertentu dalam menentukan pilihan atas calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Jawa Barat. Keputusan mereka didasarkan pada berbagai faktor yang mencerminkan integritas, kapabilitas, serta visi kepemimpinan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Dalam lingkup pemerintahan, politik berkaitan dengan bagaimana sumber daya publik dialokasikan, kebijakan dibentuk, dan kekuasaan dijalankan untuk mengatur masyarakat. Pilkada juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh legitimasi kekuasaan di tingkat daerah dan merupakan bagian dari rangkaian pemilu, seperti Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Sistem Pilkada langsung menjadi metode konkret yang memungkinkan rakyat menyampaikan hak-hak demokrasi mereka. (Pulungan, 2024). Selama kurang lebih satu dekade, Pilkada diakui sebagai mekanisme pemilihan yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh masyarakat setempat. Pilkada langsung ini memiliki keterkaitan kuat dengan prinsip demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat (Sarbaini, 2020). Dalam konteks ini, rakyat seharusnya menjadi pihak yang menentukan jalannya pemilihan, bukan sekadar objek yang diarahkan, baik dalam ranah politik nasional maupun lokal.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, Mahasiswa UPI menilai bahwa seorang pemimpin daerah harus memiliki rekam jejak yang bersih, jujur, serta bebas dari kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Etika dalam kepemimpinan menjadi faktor utama yang mereka pertimbangkan dalam memilih calon kepala daerah. Calon yang mampu menghadirkan program kerja yang jelas, berbasis data, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan akan lebih menarik bagi mahasiswa UPI. Mereka cenderung mengkritisi janji kampanye yang tidak realistis atau sekadar populis. Mahasiswa UPI menghargai pemimpin yang aktif dalam mendengar aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka lebih memilih sosok yang terbuka terhadap diskusi, tidak anti-kritik, serta mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat.

Berdasarkan hasil temuan, hal ini sesuai dengan konsep teori *rational choice* yang dicetuskan oleh Anthony Downs pada tahun 1957. Teori ini menjelaskan seorang pemilih dianggap sebagai individu yang rasional, yang menentukan pilihannya berdasarkan pada pertimbangan untung-rugi (*cost and benefit*). Pemilih dalam teori ini akan memilih kandidat dengan manfaat paling besar untuk dirinya atau kelompoknya. Peneliti melakukan identifikasi terhadap kriteria ideal yang terbentuk berdasarkan teori *rational choice* seperti visi dan misi yang realistis, program kerja yang terukur, pengalaman dan kapabilitas calon serta kredibilitas dalam merealisasikan janji.

Pembahasan diperkuat juga oleh teori sosiologis (*sociological theory*) dicetuskan oleh Martin Lipset dan Paul. F. Lazarsfeld pada tahun 1944 yang menjabarkan pilihan politik seseorang dilatarbelakangi oleh pendidikan, agama, status ekonomi dan lingkungan sosial dimana individu tumbuh. Kriteria yang terbentuk melalui pendekatan ini ialah kesamaan nilai atau prinsip dan identitas sosial, kesadaran kelompok, pendidikan kandidat serta latar belakang sosial (Birnbbaum et al., 1968). Pendekatan psikologis oleh Campbell, Miller dan Stokes pada tahun 1960 turut menjadi penguat dalam penelitian ini. Teori yang berasal dari mazhab Michigan berasumsi bahwa pilihan politik sangat

dipengaruhi oleh kekuatan psikologis individu. Keputusan memilih atau mendukung suatu kekuatan politik dipandang sebagai hasil dari sikap dan kecenderungan psikologis pemilih. Seperti yang mereka ungkapkan, “*voting is in the end an act of individuals, and the motives for this act must be sought in psychological forces of individual human beings.*” Mazhab ini berpendapat bahwa perilaku memilih dapat dijelaskan melalui dua konsep utama. Pertama, *political involvement*, yaitu perasaan penting atau tidaknya keterlibatan dalam isu-isu politik umum. Kedua, *party identification*, yaitu preferensi seseorang terhadap partai atau kelompok politik tertentu. Pada awalnya, seseorang perlu merasa bahwa partisipasinya dalam proses politik benar-benar penting. Perasaan ini akan menumbuhkan kepedulian politik yang tinggi, mendorong individu untuk memantau dan menanggapi isu-isu politik yang berkembang.

Dalam pendekatan ini, menunjukkan bahwa perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh faktor afektif (emosional) seperti ikatan terhadap partai, citra kandidat dan persepsi terhadap isu. Pendekatan psikologis membantu menjelaskan mengapa mereka lebih sensitif terhadap figur calon, gaya kepemimpinan daripada sekadar ideologi semata. Pada pembahasan ini peneliti membuat kesimpulan mengenai keinginan Mahasiswa UPI untuk memiliki pemimpin yang aktif dalam mendengar aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka lebih memilih sosok yang terbuka terhadap diskusi, tidak anti-kritik, serta mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat. Maka dari itu, pembahasan penelitian pada rumusan masalah kedua menunjukkan hasil kriteria yang dijadikan dasar untuk memilih pemimpin Jawa Barat ialah *track record*, pengalaman, *background* keluarga, partai politik yang mengusung pasangan calon, visi misi yang dibawa, program kerja dan intelektualitas serta etika para calon.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori perilaku pemilih (*voting theory behavior*) sebagai *grand theory* teori ini berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks pemilu. Hal ini sesuai dengan yang dicetuskan oleh Jack C. Plano (dalam Satriadi dkk., 2021) yang menjelaskan bahwa teori perilaku pemilih berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks pemilu. Teori ini berfokus pada analisis perilaku pemilih, motivasi, serta proses pengambilan keputusan dalam konteks pemilihan umum, baik itu pemilu legislatif, presiden, atau pemilihan kepala daerah, *Voting Theory Behavior* atau teori perilaku pemilih adalah cabang dari ilmu politik yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok memilih dalam pemilu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih tersebut. Perilaku pemilih merupakan tindakan menentukan pilihan politik yang dianggap paling sesuai atau paling diinginkan untuk dipilih. Teori perilaku pemilih berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks pemilu. Teori ini berfokus pada analisis perilaku pemilih, motivasi, serta proses pengambilan keputusan dalam konteks pemilihan umum, baik itu pemilu legislatif, presiden, atau pemilihan kepala daerah.

Pada teori perilaku pemilih seorang individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal dapat berupa idealisme, nilai atau prinsip, kehendak hati dan tingkat kecerdasan seseorang, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan seperti kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Faktor-faktor yang muncul dari dalam diri seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor sosiologis, psikologis dan ekonomi.

Kebutuhan ini berdampak secara psikologis, memberikan rasa percaya diri, nilai diri, kekuatan, dan kepuasan pribadi. (Maslow, 1970). Teori hierarki kebutuhan Maslow memiliki hubungan yang erat dengan preferensi politik, karena kebutuhan manusia yang berjenjang memengaruhi cara individu membuat keputusan politik. Preferensi politik seseorang, seperti pilihan terhadap pemimpin, kebijakan, atau partai, sering kali didasarkan pada kebutuhan yang paling mendominasi dalam kehidupan mereka. Pada tingkat kebutuhan fisiologis, individu lebih cenderung mendukung kebijakan atau kandidat yang menawarkan solusi untuk kebutuhan dasar, seperti pangan, air bersih, dan pekerjaan (Lipset, 1968.). Menurut Maslow, perilaku individu dalam pengambilan keputusan politik, sangat dipengaruhi oleh faktor pemenuhan kebutuhan yang ada dalam piramida hierarki, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Herbert Hyman (1959) dalam bukunya *Political Socialization*. Hyman menambahkan

bahwa preferensi politik individu terbentuk melalui proses internalisasi nilai, norma, dan sikap politik yang diperoleh dari lingkungan sosial, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, media, dan organisasi masyarakat

Dalam konteks ini, isu-isu ekonomi dan kesejahteraan menjadi fokus utama. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, perhatian bergeser ke kebutuhan keamanan. Orang akan memilih pemimpin atau kebijakan yang menjamin perlindungan fisik, stabilitas sosial, dan keamanan ekonomi, seperti kebijakan pertahanan, hukum, atau perlindungan sosial. Pada pembahasan ini peneliti melakukan analisis, mahasiswa UPI sebagai pemilih cenderung memilih calon pemimpin yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, terutama pada level kebutuhan sosial, rasa aman, dan aktualisasi diri. Sebagai contoh, kebutuhan akan rasa aman tercermin dalam harapan mahasiswa terhadap pemimpin yang bebas dari korupsi dan memiliki rekam jejak yang bersih. Pemimpin yang mampu menciptakan kebijakan pendidikan yang stabil, adil, dan berpihak pada mahasiswa pun dianggap sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan akan stabilitas dan kepastian masa depan.

Kebutuhan sosial juga menjadi pertimbangan penting; mahasiswa UPI cenderung memilih pemimpin yang memperlihatkan kepedulian terhadap kelompok-kelompok marginal di Jawa Barat, serta memiliki kepekaan terhadap suara dan aspirasi masyarakat kecil. Peneliti beranggapan bahwa mahasiswa menaruh harapan pada kandidat yang mampu membangun hubungan sosial yang erat dan empatik dengan rakyatnya. Lebih jauh, preferensi terhadap calon yang memiliki visi jangka panjang dalam pengembangan pendidikan, kewirausahaan, dan teknologi dapat dikaitkan dengan kebutuhan aktualisasi diri yakni dorongan mahasiswa untuk berkembang, berdaya, dan menjadi bagian dari perubahan sosial.

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa UPI menginginkan sosok pemimpin yang memiliki integritas tinggi, sosok yang memiliki etika atau kepribadian yang baik, dekat dengan rakyat, berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila, berbudi luhur dan memiliki wibawa. Pemimpin yang ideal bukan hanya pandai mengumbar janji manis, tetapi mampu merealisasikan program kerja yang dijanjikan. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi preferensi politik mahasiswa UPI dalam memilih kandidat kepala daerah khususnya calon gubernur yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut antara lain ialah nilai atau prinsip pribadi, pengetahuan politik dalam diri, tingkat literasi dalam berpolitik, pengalaman, hati nurani, kecerdasan politik, pandangan ideologis serta suasana kebatinan akibat pengaruh agama, sosial dan organisasi sedangkan faktor eksternal dapat meliputi rekam jejak, pengalaman setiap kandidat, etika politik tiap perorangan, partai pengusung serta pengaruh lingkungan sosial termasuk diskusi dengan teman sebaya, dosen, organisasi kemahasiswaan, media sosial, keterbukaan terhadap aspirasi publik.

Referensi

- Badan Pusat Statistik (2023). *Generasi Muda Generasi dengan Populasi Terbesar di Indonesia*.
Badan Pusat Statistik (2024). *Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat* <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTIxIzI=/laju-pertumbuhan-pendudukkabupaten-kota-provinsi-jawa-barat-hasil-sensus-penduduk-2020.html> (diakses pada jam 07.00 , tanggal 6 Oktober 2024).
Birnbaum, P., Lipset, S., & Rokkan, S. (1968). Party systems and voter alignments. cross national perspectives. *Revue Française De Sociologie*, 9(3), 420. <https://doi.org/10.2307/3320570>
Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
Efendi, A., & Poernomo, F. (2022). Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 247. <https://doi.org/10.31078/jk1921>
Fatma Sjoraida, D., & Ruchiat Nugraha, A. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan Politik Melalui Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi*

- IPTEKS, 1(2), 104–111. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i2.20>
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48859>
- Fithriya, D. N. L. (2024). Telaah Framing Debat Capres dalam Perspektif Pemilih Muda (Analisis Persepsi dan Preferensi Pemilih Muda pada Pemilu 2024). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(1), 360. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.360-364>
- Hutabarat, D. T. H., Sari, A. A., Wella, A., Elfindra, A., Lubis, F. F., MHD, F. M., MPR, F. A., & Rahmadani, S. (2022). Pendidikan Pancasila: Negara, Agama, Dan Warga Negara. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i1.202>
- Komisi Pemilihan Umum (2024). Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702> diakses pada 07 Oktober 2024.
- Maslow, A. H. (1970). Motivation amd Personality. *Harper & Row*, 369.
- Murdiono, M., Sapriya, S., Wahab, A. A., & Maftuh, B. (2015). Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda Berkarakter Pancasila. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.2790>
- Putri, M., Saputra, R., Iswardhana, M. R., Emillia, Rastati, R., Sugiharto, A., Rendra, A., Rachimoellah, M., Zahri, T. A., Octaviany, N., & Lubis, P. H. (2023). *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis*.
- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>
- Satriadi, Y., Yusuf, S., & Ali, R. (2021). Understanding the Voter's Behavior as an Effort to Increase Publics' Political Participation in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(2), 960–972. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i2/9192>
- Sinka, V., & Mukhsan, Z. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah pada Masa Pilkada Serentak. 17(2). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1171>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sumantri, E., Darmawan, C., & Saefulloh. (2008). Modul 1: Generasi dan Generasi Muda. *Universitas Terbuka*, 1–35. <http://repository.ut.ac.id/3897/1/PKNI4312-M1.pdf>
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Nomor May).